

BAB I

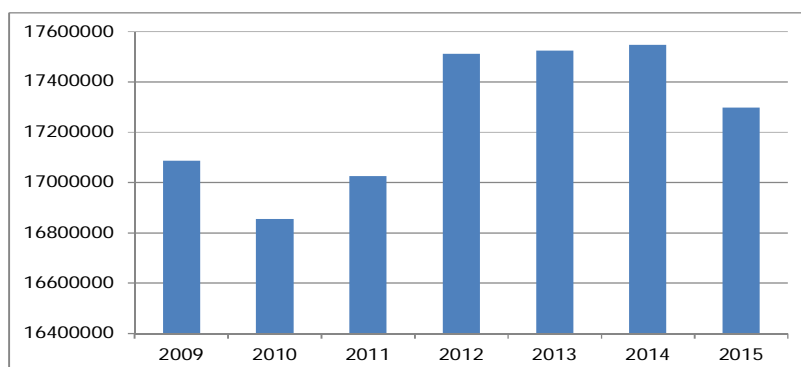
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses yang meliputi pembangunan struktur sosial, dan pembangunan sikap mental serta pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan masalah kemiskinan. Pembangunan ekonomi pada dasarnya sama dengan pembangunan nasional secara keseluruhan, karena yang menjadi permasalahannya sama yaitu mengatasi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan sebagainya (Todaro, 2006).

Sebagaimana penelitian Menajang (2012) yang menyatakan bahwa kebijakan perluasan kesempatan kerja merupakan suatu kebijakan penting dalam pelaksanaan pembangunan karena salah satu tolok ukur untuk menilai keberhasilan ekonomi suatu negara atau bangsa adalah kesempatan kerja yang diciptakan oleh adanya pembangunan ekonomi. Kesempatan kerja itu merupakan aspek sosial ekonomi yang terpojok. Demikian juga dengan penelitian Nuraini (2010) yang menyatakan bahwa Produk Domestik Regionalnya maka wilayah Kota memiliki pendapatan yang lebih tinggi dengan wilayah Kabupaten. Pemerataan tenaga kerja diketahui dari hasil data BPS antara tahun 2009-2016 sebagai berikut:

Gambar 1.1. Jumlah Angkatan Kerja 2009-2016 Jawa Tengah



(Sumber: BPS.go.id)

Pokok masalah tersebut, melalui proses pembangunan dipecahkan dengan cara-cara tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan lain-lain. Dalam rangka mengembangkan daerah, dengan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yakni peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, pengurangan pengangguran, maka daerah akan mengembangkan sektor-sektor perekonomian sesuai dengan keunggulannya (Todaro, 2006).

Keunggulan sektor ekonomi daerah, dikarenakan sektor tersebut mempunyai permintaan nasional atau ekspor yang tinggi. Hal itu dapat terjadi apabila biaya produksi rendah, sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam perekonomian yang lebih luas. Daya saing suatu daerah akan terlihat melalui proses perdagangan antar daerah (*inter-regional*) maupun internasional. Dalam jangka panjang sektor-sektor yang memiliki daya saing akan menjadi spesialisasi daerah (Todaro, 2006).

Kebijakan pembangunan secara sektoral yang strategis adalah pembangunan sektor industri dan hampir semua negara cenderung mengutamakan sektor industri. Sektor industri dipandang sebagai sektor yang

memiliki tingkat produktivitas yang tinggi, sehingga dengan keunggulan sektor industri akan di dapat nilai tambah yang tinggi, yang pada akhirnya tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi lebih cepat terwujud. Terlepas dari beragamnya strategi pembangunan sektor industri di setiap negara, diyakini bahwa sektor ini telah menjadi prioritas. Dalam kenyataannya, tidak semua negara berhasil mengembangkan sektor industrinya yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak tepat dan tidak konsisten, sehingga mempengaruhi kinerja sektor industri itu sendiri.

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu berlangsung sistemik. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan cepat, sementara beberapa daerah lain mengalami pertumbuhan yang lambat karena perbedaan sumber-sumber yang dimiliki, adanya kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, juga tenaga kerja yang terampil di samping itu adanya ketimpangan redistribusi pembagian pendapatan dari pemerintah pusat kepada daerah (Aldilla, 2011).

Permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi yakni mengatasi pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dapat dicapai dengan pengembangan sektor-sektor perekonomian sesuai dengan keunggulan yang dimiliki daerah yang dipadukan dengan biaya produksi rendah sehingga memiliki daya saing yang tinggi dalam perekonomian yang lebih luas. Sektor industri manufaktur merupakan industri yang dipandang mampu sebagai pendorong dan penggerak

ekonomi daerah demi tercapainya tujuan pembangunan regional dan nasional tersebut. Spesialisasi industri manufaktur daerah yang terbentuk dari daya saing yang tinggi akan menyebabkan berkembangnya sektor tersebut. Pertumbuhan sektor spesialisasi menyebabkan output, nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja yang semakin meningkat sehingga akan tercipta kesempatan kerja yang semakin luas (Sukirno, 2006).

Tabel 1.2 Banyaknya Tenaga Kerja Menurut Jenis Industri di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013 (Orang)

Jenis Industri <i>Kind of Industry</i>	2009	2010	2011	2012	2013
01. Agro Industri	1,505,393	1,458,551	1,203,762	1,557,871	1,574,186
- Besar/ <i>Large</i>	459,427	447,511	469,146	473,655	476,932
- Kecil dan Menengah/ Small and Medium	1,045,966	1,011,040	734,616	1,084,216	1,097,254
02. Industri/ <i>Industry</i>	1,858,125	1,797,120	1,338,718	1,910,465	1,957,492
- Besar/ <i>Large</i>	139,325	135,712	140,134	141,482	167,236
- Kecil dan Menengah/ Small and Medium	1,718,800	1,661,408	1,198,584	1,768,983	1,790,256
Industri Besar dan Kecil dan Menengah	598,752	583,222	609,280	615,137	644,168
- Total	3,363,518	3,255,670	2,542,480	3,468,336	3,531,678

Sumber : jateng.BPS.go.id

Melihat pertumbuhan jumlah tenaga kerja dari tahun 2009 hingga tahun 2013 pada tabel di atas terlihat bahwa sektor industri masih cenderung menyerap tenaga kerja terbanyak dan industri manufaktur merupakan sektor industri yang berpotensi di Jawa Tengah. Akan tetapi, masih terdapat ketimpangan pangsa tenaga kerja manufaktur. Di satu sisi terdapat daerah dengan penyerapan tenaga kerja yang relatif besar seperti Kabupaten Jepara,

Kabupaten Kudus, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang dan Kabupaten Klaten. Di sisi lain terdapat daerah dengan pangsa penyerapan tenaga kerja yang sangat rendah seperti Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Tegal, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.

Indikator berkembangnya spesialisasi industri dapat dilihat dari jumlah output pada masing-masing daerah. Di Jawa Tengah hanya terdapat beberapa daerah yang mampu menghasilkan output yang relatif besar seperti Kota Semarang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Kudus. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan para investor lebih memilih daerah di Kota-Kota inti (*core region*) dari pada Kota-Kota pinggiran (*fringe region*) karena perbedaan kelengkapan sarana dan prasarana penunjang untuk didirikannya industri dengan skala yang besar (Aldilla, 2011).

Penelitian Aldilla (2011) tentang pengaruh tenaga kerja dan output terhadap indeks ketimpangan penyerapan tenaga kerja industri yang dilakukan di industri manufaktur di Jawa Tengah memberikan hasil bahwa bila pangsa pasar semakin besar, maka semakin besar indeks ketimpangan tenaga kerja. Sedangkan output yang merupakan produk domestik bruto (PDB) memberikan bukti bahwa semakin tinggi tingkat output maka indeks ketimpangan penyerapan tenaga kerja di industri manufaktur juga semakin besar. Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian Aldilla (2011), penelitian-penelitian sejenis juga yang mirip dengan penelitian ini yang menjadi dasar penulisan penelitian yang sekarang antara lain penelitian Takyudin (2016) yang meneliti penyerapan tenaga kerja pada usaha

percetakan fotokopi di Kendari, penelitian Martilova dkk (2013) yang meneliti tentang perencanaan output dan kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Barat, penelitian Imam Juhari dkk (2009) yang meneliti tentang dampak perubahan upah terhadap output dan kesempatan kerja industri manufaktur di Jawa Tengah. Beberapa penelitian tersebut merupakan penelitian yang mendukung terhadap pengaruh tenaga kerja terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur di Jawa Tengah.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang jumlah tenaga kerja industri manufaktur, upah minimum regional kabupaten/kota, produk domestik regional bruto, dan pendidikan terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja pada industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh upah minimum regional kabupaten/kota, produk domestik regional bruto, dan pendidikan secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimanakah pengaruh upah minimum regional kabupaten/kota, produk domestik regional bruto, dan pendidikan secara simultan terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh secara parsial yaitu: upah minimum regional kabupaten/kota, produk domestik regional bruto, dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengetahui pengaruh simultan antara upah minimum regional kabupaten/kota, produk domestik regional bruto, dan pendidikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri manufaktur di Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

1. Pemerintah (*policy maker*), sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan yang akan diambil, khususnya kebijaksanaan yang berhubungan dengan pengaturan tenaga kerja.
2. Ilmu Pengetahuan
 - a. Memperkaya dan memperdalam khasanah penelitian sejenis yang telah ada sebelumnya.
 - b. Sebagai bahan informasi dan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- c. Peneliti

Penelitian ini merupakan wujud nyata penerapan teori-teori yang telah di dapat di bangku kuliah serta sebagai wahana latihan dalam memperluas khasanah keilmuan.

E. Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini yaitu konsep-konsep yang berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu sebagai bahan referensi pembandingan bagi penelitian ini. Pada bab ini juga dibahas mengenai kerangka pemikiran yang akan memperjelas arah penelitian dan hipotesis.

BAB III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang data dan sumber data. Metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, dan metode analisis data. Merupakan bab metode penelitian dan definisi operasional, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil pengolahan data yang telah dilakukan yang terkait tujuan penelitian, pengujian hipotesis dan penerapan metode yang digunakan.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik obyek penelitian ataupun bagi penelitian selanjutnya.